

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011-2015***ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE LOCAL GOVERNMENT IN  
SOLOK SELATAN REGENCY FROM 2011 UNTIL 2015***Agung Muhatri, Agus Sutarjo**

Program Studi Akuntansi, Ekonomi, Universitas Ekasakti

E-mail : [agungmuhatri7@gmail.com](mailto:agungmuhatri7@gmail.com)**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Data dianalisis menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis pertumbuhan dan analisis rasio keuangan.

Dari analisis, peneliti menyimpulkan bahwa; Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mencapai target pendapatan pada tahun 2011-2015 cukup baik dan efektif. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah baik dalam meningkatkan pendapatan asset dan ekuitas dari tahun ke tahun. Kewajiban mengalami penurunan pada tahun 2011,2012 dan 2015 tetapi juga mengalami kenaikan pada tahun 2013-2014. Disisi lain, hasil rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian daerah Kabupaten Solok Selatan sangat rendah. Ini berarti, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai keperluan daerahnya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan Pemerintah Daerah Solok Selatan harus lebih memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tidak terlalu bergantung terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan bisa menjalankan otonomi daerah dengan baik.

**Kata Kunci : Kinerja, Pendapatan, and Kemandirian****ABSTRACT**

*The purpose of the study is to identify financial performance of the local government in Solok Selatan Regency from 2011 until 2015. Performance is the representation of the achievement level from an implementation activity in realizing target, purpose, mission and vission of an organization. The data are analyzed with quantitative analysis by using growth analysis and financial ratio analysis.*

*From the analysis, the writer concludes that; financial performance of the local government in Solok Selatan Regency from 2011 until 2015 is good and effective enough. The local government in Solok Selatan Regency is also good in increasing revenue, asset and equity from year to year. The liabilities decreased in 2011, 2012 and 2015 but the liabilities also increased in 2013-2014. On the other side, the result of the degree of decentralization ratio and the ratio of local financial independence of Solok Selatan Regency are very low. It means the local government of Solok Selatan Regency is still very dependent on the central government in financing the needs of the region. Therefore, the writer suggests the local government of Solok Selatan Regency should maximize the potential of their region to increase the local revenue. So that the local government of Solok Selatan Regency can be less dependent on the central government and the provincial government and can run the regional autonomy well.*

**Keywords: Performance, Revenue and Independence.**

## PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan di Indonesia dimulai dengan diwajibkannya pemerintah Indonesia agar memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan dalam UU No. 17 Tahun 2003. Pertama kalinya pemerintah Indonesia memiliki standar dengan diterapkannya PP No. 24 Tahun 2005, yang kemudian diubah dengan PP No. 71 tahun 2010.

Negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan dana untuk membiayainya. Maka sebagai acuan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam tahun yang berkenaan, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri, sehingga pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing.

Dalam pelaksanaan perekonomian daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu.

Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik sehingga diperlukan analisa kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran pendapatan daerahnya dengan menggunakan beberapa analisa diantaranya, analisis pertumbuhan yang digunakan untuk menilai pertumbuhan dari asset, utang, ekuitas, pendapatan dan belanja, serta analisis ratio keuangan yang digunakan untuk mengukur kelemahan dan kekuatan sebuah pelaporan entitas.

Bedasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015**”.

### Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka ditetapkan perumusan masalah yang dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai akuntansi pemerintahan yang dipelajari penulis selama mengikuti kuliah dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu akuntansi yang diperoleh selama mengikuti kuliah dengan menerapkan pada sistem akuntansi yang diterapkan dalam pemerintahan.
2. Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan serta tingkat pertumbuhannya..
3. Sebagai bahan informasi bagi kalangan akademisi yang membutuhkan dan untuk melengkapi informasi kepustakaan.

### **LANDASAN TEORI**

#### **Laporan Keuangan Sektor Publik**

Laporan keuangan sektor publik adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah dari pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya (Erlina, 2008: 18). Sedangkan pengertian laporan keuangan sektor publik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah: "Laporan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan". Informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik dapat dilihat dari laporan keuangan. Artinya informasi tentang posisi keuangan daerah dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan dapat diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

#### **Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, pelaporan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam proses perumusan penskemaan strategis suatu organisasi (Indra Bastian, 2014: 359). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa “Kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.” Sedangkan sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial (Mardiasmo, 2009).

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak (Mahmudi, 2011:159)

### **Analisis Laporan Keuangan Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan**

1. Analisis Pertumbuhan

Adapun cara menghitung pertumbuhan yaitu :

$$\text{Pertumbuhan } X_t = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$X_t$  = Data variabel X pada tahun t

$X_{t-1}$  = Data variabel X pada tahun t-1

(Mahmudi, 2011:162)

2. Analisis Rasio-Rasio Keuangan :

- a. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

- b. Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio kemandirian daerah} = \frac{PAD}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

- c. Rasio Efektivitas Pendapatan

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

d. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

## METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Neraca. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

### 4. Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Analisis kuantitatif yang penulis gunakan adalah analisis varians, pertumbuhan dan rasio keuangan.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun 2010 pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 342.443.713.646 naik menjadi Rp. 439.476.781.649,00 pada tahun 2011. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2012 menjadi Rp. 461.402.661.175,00. Dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan pendapatan menjadi Rp. 515.127.843.434,00 naik kembali pada tahun 2014 menjadi Rp. 630.492.374.821,00, serta meningkat di tahun 2015 menjadi Rp. 739.447.807.717,00. Kenaikan pendapatan setiap tahun tersebut diperoleh karena meningkatnya pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Upaya pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat.

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2011). Jika dilihat pertumbuhan dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Solok Selatan sudah baik.

## 2. Rasio Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Belanja dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan belanja daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun 2010 belanja daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 319.351.847.911,00 naik menjadi Rp. 396.299.923.853,00 pada tahun 2011. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2012 menjadi Rp. 487.389.724.518. Dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan belanja menjadi Rp. 530.578.741.208,00 naik kembali pada tahun 2014 menjadi Rp. 578.477.701.531,00. Serta meningkat di tahun 2015 menjadi Rp. 673.853.815.917,00. Kenaikan belanja setiap tahunnya ini diperoleh dari belanja operasi dan dan belanja modal.

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2011). Jika dilihat dari perkembangan belanja dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan dengan rata rata ratio sebesar 16,29%, maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan belanja Kabupaten Solok Selatan mengalami pertumbuhan secara negatif. Pertumbuhan belanja daerah yang selalu naik ini menunjukkan bahwa beban daerah dari tahun ke tahun juga bertambah. Pertumbuhan belanja yang terus-menerus naik ini harus diimbangi dengan pendapatan yang tinggi agar tidak menimbulkan defisit anggaran.

## 3. Ratio Pertumbuhan Asset

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Asset dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan secara fluktuatif untuk asset daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2010 asset daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 605.640.567.917,00 naik menjadi Rp. 661.372.027.288,00 pada tahun 2011. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2012 menjadi Rp. 779.162.071.413. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan asset menjadi Rp. 1.327.611.170.615, tetapi pada tahun 2014 terjadi penurunan asset menjadi Rp. 995.750.562.971,00, penurunan asset ini disebabkan karena laporan keuangan pemerintah daerah solok selatan pada tahun 2013 tidak menyajikan nilai Akumulasi penyusutan, pada tahun 2013 tersebut pemerintah daerah solok selatan sedang melakukan sinkronisasi data untuk mendapatkan data rincian asset tetap dengan melaksanakan sensus barang milik daerah terhadap seluruh SKPD, sehingga pada tahun anggaran 2014 nilai asset telah disajikan dengan wajar. Pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan pada asset daerah menjadi 1.592.51.927.742,00. Kenaikan pertumbuhan asset tersebut terjadi karena ada peningkatan nilai terhadap asset lancar dan asset tetap setiap tahunnya.

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2011). Jika dilihat dari perkembangan asset daerah dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan yang fluktuatif dengan rata rata ratio sebesar 26,47%, maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan belanja Kabupaten Solok Selatan mengalami pertumbuhan secara baik. Selain karena terjadi penyesuaian terhadap nilai asset, pertumbuhan asset milik pemerintah pada tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan ini membuktikan kinerja pemerintah daerah telah baik pada periode ini.

#### 4. Ratio Pertumbuhan Kewajiban

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan kewajiban dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kewajiban daerah secara fluktuatif dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun 2010 kewajiban daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 1.36.140.205,00 turun menjadi Rp. 492.306.255,00 pada tahun 2011. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2012 menjadi Rp. 102.870.148,00. Dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan kewajiban menjadi Rp. 336.582.765,00 Kenaikan ini karena pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang belum dilakukan sampai dengan 31 Desember 2013. Pada tahun 2014 kembali naik menjadi Rp. 5.284.658.808,00 hal ini disebabkan karena kewajiban jangka pendek lainnya pada tahun 2014 terdapat dana yang penguasaannya diluar dari pelaksanaan anggaran penerimaan dan belanja daerah berupa dana siap pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) dan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP). Pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan kewajiban menjadi 22,74%. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 4.083.165.537,00.

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2011). Jika dilihat dari pertumbuhan kewajiban daerah dari tahun ke tahun yang mengalami penurunan fluktuatif maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan kewajiban Kabupaten Solok Selatan sudah baik. Tetapi secara rata-rata rasio pertumbuhan kewajiban memiliki persentase 306,32%. Pertumbuhan rata-rata ratio kewajiban yang tinggi ini disebabkan oleh belum terealisasinya dana kewajiban sesuai dengan tahun tahun buku pelaporan keuangan. Diharapkan pemerintah kabupaten Solok Selatan bisa melakukan realisasi biaya sesuai dengan tahun buku pelaporan.

#### 5. Ratio Pertumbuhan Ekuitas

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Ekuitas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan secara fluktuatif untuk Ekuitas daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2010 ekuitas daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 604.279.427.712,00 naik menjadi Rp. 660.879.721.033,00 pada tahun 2011. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2012 menjadi Rp. 779.059.201.265,00. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan ekuitas menjadi Rp. 1.327.274.587.850, tetapi pada tahun 2014 terjadi penurunan Ekuitas menjadi Rp. 990.465.904.163,00 penurunan ekuitas ini disebabkan karena adanya sinkronisasi data asset tetap terhadap perhitungan penyusutan, sehingga nilai asset yang disajikan merupakan nilai buku bersih sampai dengan 31 desember 2014. Hal ini yang menyebabkan penurunan terhadap pos ekuitas dana investasi dalam asset tetap sebesar Rp. 305.138.715,00 terhadap tahun 2013. Pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan pertumbuhan ekuitas menjadi 1.588.432.762.205,00. Peningkatan pertumbuhan ekuitas ini disebabkan karena meningkatnya jumlah ekuitas dana lancar dan Ekuitas dana investasi yang dimiliki oleh Kabupataen Solok Selatan.

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2011). Jika dilihat dari pertumbuhan ekuitas daerah dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan yang fluktuatif dengan rata rata ratio sebesar 26,52%, maka dapat dikatakan Rasio

Pertumbuhan belanja Kabupaten Solok Selatan mengalami pertumbuhan secara Positif. Selain karena terjadi sinkronisasi data asset tetap terhadap perhitungan penyusutan yang menyebabkan penurunan terhadap pos ekuitas dana investasi dalam asset tetap, dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan sudah melakukan pertumbuhan terhadap ekuitas dengan baik.

## **Pembahasan Analisis Ratio Keuangan**

### **a. Ratio Derajat Desentralisasi**

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Derajat Desentralisasi dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan pendapatan daerah. Tetapi jika diukur dengan derajat desentralisasi tidak terjadi peningkatan yang cukup berarti bahkan ada yang mengalami penurunan. Pada tahun 2011 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sangat kurang yaitu sebesar 3,36%, sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,78%. pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu menjadi 4,31% dan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan kembali yaitu masing – masingnya 5,13% dan 5,57%.

Tingkat desentralisasi adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Mahmudi, 2011). Jika dilihat dari rasio Derajat Desentralisasi dari tahun ke tahun dengan rata rata ratio sebesar 4,63% menunjukan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat kurang. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan bisa lebih mengoptimalkan Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah supaya bisa lebih optimal dalam hal kegiatan Desentralisasi.

### **b. Rasio Kemandirian Daerah**

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Diketahui jika realisasi PAD Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 PAD Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp 14.787.380.368,00 atau sebesar 3,51% dari total pendapatan transfer. Mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu menjadi Rp 22.054.660.988,00 atau sebesar 5,07% dari total pendapatan pendapatan transfer. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Solok Selatan mengalami kenaikan menjadi Rp 22.225.149.672,00 atau sebesar 4,54% dari total pendapatan. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 32.342.605.637,00 atau sebesar 5,43% dari total pendapatan transfer. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 41.207.396.925,00 atau 6,08% dari total pendapatan transfer.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Mahmudi, 2011). Tujuan pelaksanaan otonomi daerah menurut undang undang no. 32 tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Kenaikan terhadap bantuan dari pihak esktern ini menyebabkan pola hubungannya menjadi Instruktif di mana peranan

pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah Solok selatan harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya.

**c. Rasio Efektifitas Pendapatan**

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas pendapatan menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Kabupaten Solok Selatan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 realisasi pendapatan sebesar Rp 14.787.380.368,00 atau 92,95% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2012 realiasi pendapatan meningkat menjadi Rp 22.054.660.988,00 atau 96,92% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2013 realisasi pendapatan menurun menjadi 78,14% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2014 realisasi pendapatan kembali menurun menjadi 77,02% dari total anggaran pendapatan, rataan ini menjadi rataan paling rendah untuk tingkat efektifitas pendapatan asli daerah karena pemerintah daerah solok selatan terlalu tinggi menganggarkan pendapatan asli daerahnya yakni sebesar 48% dari anggaran tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi pendapatan kembali naik menjadi Rp 41,207,396,925,00 atau 110.34% dari total anggaran pendapatan.

Rasio Efektifitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2011). Menurut uraian dan hasil perhitungan pada rasio efektifitas pendapatan, kinerja keuangan Kabupaten Solok Selatan cukup efektif karena rata-rata efektifitasnya sebesar 91,08%.

**d. Rasio Efisiensi Belanja**

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi belanja menunjukkan bahwa realisasi belanja setiap tahunnya selalu meningkat tetapi tidak lebih tinggi dari anggaran belanja. Pada tahun 2011 realisasi belanja sebesar Rp 396.299.923.853,00 atau 83.05% dari total anggaran belanja. Pada tahun 2012 realiasi belanja meningkat menjadi Rp 487.389.724.518,00 atau 91.59% dari total anggaran belanja. Pada tahun 2013 realisasi belanja meningkat sebesar Rp 530.578.741.208,00 atau 91.99% dari total anggaran belanja. Kemudian pada tahun 2014 realisasi belanja meningkat menjadi Rp 578.477.701.531,00 atau 87.58% dari total anggaran belanja. Pada tahun 2015 anggaran belanja kembali naik menjadi Rp 673.853.815.917,00 atau 88.64% dari total anggaran belanja.

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah (Mahmudi, 2011). Jika dilihat dari nominalnya baik dari tahun 2011 – 2015 terus mengalami kenaikan, namun dilihat dari rata-rata rasio tetap di bawah anggaran belanja yakni sebesar 88,57%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kurang baik karena tidak mampu menyarap dana sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Solok Selatan tahun 2011-2015 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Solok Selatan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata rasio sebesar 16,93%, ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam hal pertumbuhan pendapatan sangat baik.
2. Pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Solok Selatan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata rasio sebesar 16,29%. Pertumbuhan belanja yang selalu mengalami kenaikan menunjukkan bahwa beban daerah dari tahun ke tahun bertambah. Pertumbuhan belanja yang terus-menerus naik ini sebaiknya diimbangi dengan pendapatan yang tinggi agar tidak menimbulkan defisit anggaran.
3. Pertumbuhan aset Pemerintah Daerah tahun 2011-2015 selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata rasio sebesar 26,47%. Maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan belanja Kabupaten Solok Selatan mengalami pertumbuhan secara baik.
4. Pertumbuhan kewajiban cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun kecuali 2013 dan 2014 yang masing-masing meningkat sebesar 227,19% dan 1470,09%. Peningkatan pertumbuhan kewajiban pada tahun 2013 dan 2014 ini disebabkan oleh belum terealisasinya dana kewajiban sesuai dengan tahun-tahun buku pelaporan keuangan. Diharapkan pemerintah kabupaten Solok Selatan bisa melakukan realisasi biaya sesuai dengan tahun-tahun buku pelaporan.
5. Pertumbuhan ekuitas Pemerintah Daerah tahun 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata rasio sebesar 26,52%. Ini membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Solok Selatan dalam hal pertumbuhan ekuitas sudah baik.
6. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan dalam hal derajat desentralisasi Kabupaten Solok Selatan sangat kurang yakni dengan persentase 4,63%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah masih sangat kurang.
7. Pola hubungan kemandirian daerah Kabupaten Solok Selatan bersifat instruktif dengan rata-rata rasio sebesar 4,93%. Sifat instruktif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan masing-masing sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai keperluan daerahnya serta belum mampu melaksanakan otonomi daerah.
8. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Solok Selatan memiliki rasio sebesar 91,08%. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Solok Selatan cukup efektif dalam hal realisasi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah.
9. Jika dilihat dari nominalnya baik dari tahun 2011 – 2015 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata rasio 88,57%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kurang baik karena tidak mampu menyerap dana sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

### Saran

Agar kinerja Pemerintah Daerah dapat lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya maka penulis menyampaikan beberapa hal untuk menjadi saran yaitu:

1. Pemerintah Daerah hendaknya berusaha untuk lebih memaksimalkan lagi realisasi pendapatan asli daerah supaya bisa efektif terhadap anggaran yang ada.

Memaksimalkan pendapatan asli daerah akan dapat mengimbangi belanja daerah yang selalu naik dari tahun ke tahun sehingga pemerintah tidak harus terus-menerus menambah hutang daerah untuk menutupi belanja daerah yang selalu naik.

2. Pemerintah Daerah Solok Selatan harus lebih bisa memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk menamahi Pendapatan Asli Daerah supaya tidak terlalu bergantung terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan bisa menjalankan otonomi daerah dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim, dkk, 2012, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Agustin, Fitriyah, 2011, Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Blitar. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Assidiqi, Bahrun, 2014, *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ananda, Chitra, 2012, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang*. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Gunadarma.
- Bastian, Indra, 2014, *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- Bisma, I Dewa Gede dan Susanto, Hery. 2010, “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007”. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3*.
- Erlina, 2008, *Akuntansi Sektor Publik Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, Medan: USU Press
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*, Jakarta: Salemba Empat.
- Jusmawati, 2011, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Hasanuddin.
- Kasmir, 2009, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Machmud, Masita, 2014, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012”. *Jurnal Berkala Ilmia Efisiensi, Vol. 14, No. 2*.
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi, 2011, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta; UII Press
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.

- Muhibtari, Astiana Nabila, 2014, *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pramita, Puput Risky, 2015, *Analisis Ratio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 – 2013*. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pramono, Joko, 2014, “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)”. *Jurnal Ilmiah Among Makarti, Vol 7, No. 13*.
- Saputra, Sandy Chandra, 2015, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2014”. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol. 4*.
- Syafi'i, 2009, *Intermediate Accounting*, Jakarta: AV Publisher.
- Yuliana, 2013. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Ditinjau dari Rasio Keuangan (Studi Kasus Kab. Sragen 2010 – 2012)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.